

# **POLITIK MENURUT ALKITAB DAN IMPLIKASINYA BAGI PERAN GEREJA DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA**

**Dr. Adolf Bastian Simamora**

## **ABSTRAK**

Saat ini warga Indonesia disibukkan dengan kegiatan politik yakni berhubungan dengan Pemilihan Legislatif ditingkat dua, satu dan pusat secara serempak dan juga pemilihan Presiden dan wakil Presiden pada tahun 2019. Berita ini dimuat dalam media sosial, surat kabar maupun televisi tentang gereja-gereja atau perkumpulan pendeta dari aras tertentu yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Pilpres tertentu. Bagaimana pandangan gereja terhadap berita ini? Apakah yang menjadi dasar pedoman peran gereja dalam menjalankan hak dan kewajiban berpolitik di negara kita?

Tulisan ini mengulas masalah penelitian tentang pandangan politik Alkitab khususnya pandangan Kitab Injil dan Kitab Roma dan implikasinya bagi peran gereja dalam pusaran politik di Indonesia. Makalah ini membahas dasar teologis tentang pandangan yang setuju dan tidak setuju bahwa gereja harus terlibat dalam politik di tanah air ini. Tujuan penelitian dari makalah ini adalah menjelaskan pemahaman politik Alkitab dan implikasinya bagi peran gereja dalam pusaran politik di Indonesia. Prosedur Penelitian dari makalah ini menggunakan metode kajian kepustakaan khususnya pandangan politik Alkitab yang terdapat dalam kitab Injil dan kitab Roma dan implikasinya bagi peran gereja dalam pusaran politik di Indonesia.

Kesimpulan makalah ini mengacu kepada pandangan politik Alkitab bahwa Gereja harus menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara menurut pandangan politik kitab Injil dan kitab Roma. Gereja bukan anti pluralistik dan mendukung kebebasan warganya berpolitik. Implikasi peran gereja secara nyata bahwa gereja secara individual dapat menjadi politikus, sedangkan gereja secara institusional tidak berpolitik praktis. Namun gereja tetap aktif menjalankan fungsi sosial kontrol melakukan “suara kenabian” di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia.

Kata - kata kunci : politik, pandangan Alkitab (Injil dan Roma), peran gereja di Indonesia

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Sebagai warga negara, kehidupan orang Kristen tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika orang Kristen memiliki hak dan tanggungjawab di dalam bergereja, orang Kristen pasti memiliki hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana orang Kristen menempatkan posisinya di dalam situasi yang demikian. Di mana hubungan gereja dan negara tidak terlepas dari masalah bahkan sudah ada sejak lama. Hubungan itu sesuatu yang dinamik dari waktu ke waktu. Dalam hal inilah bagi orang Kristen perlu pemahaman yang Alkitabiah tentang hubungan Gereja atau orang Kristen dengan negara atau pemerintah. Pada prinsipnya Gereja memahami bahwa kehadirannya adalah sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia (Mat. 5 : 13,14). Dasar inilah yang mewarnai semua misi, sikap, aktivitas dan pelayanan gereja, dalam berbagai kegiatan kehidupan. Dalam konteks pemahaman itu, dapat dilihat sikap Yesus Kristus dan para rasul terhadap pemerintah pada masanya masing-masing. Dalam kehidupan gereja, sikap itu ada kalanya berubah dan berbeda sesuai dengan keadaan dan konteksnya. Namun menjadi garam dan terang tetap menjadi dasar teologis untuk memahami hubungan Gereja atau orang Kristen dan negara atau pemerintah pada masa kini. Trilogi panggilan gereja di dunia yakni *Marturia* (Bersaksi), *Koinonia* (Bersekutu) dan *Diakonia* (melayani) harus dilakukan dengan dasar teologis yang benar. Makalah ini meneliti menggunakan pandangan Alkitabiah dengan meneliti nats-nats untuk meluruskan kesimpangsiuran pemahaman teologis tentang politik.

Makalah ini menyoroti pandangan Kitab Roma dan Kitab Injil dan implikasi bagi peran gereja dalam pusran politik di Indonesia. Bagaimana Kitab Injil dan Kitab Roma memandang posisi Gereja di dalam suatu pemerintahan yang berdaulat. Dan dalam pembahasan ini pemahaman penulis tentang Gereja adalah tertuju kepada orangnya dan Gereja sebagai lembaga. Teologi Politik Paulus tentang ketaatan terhadap Pemerintah adalah salah satu topik yang juga menarik untuk dikaji. Tulisan ini hanya memberikan sedikit pemikiran dan refleksi terhadap konsep politik Paulus dalam kitab Roma 13:1-7.

## **Masalah Dan Wawasan Pemecahan Masalah**

Pandangan gereja yang menganggap bahwa politik itu kotor dan jahat, politik itu menghalalkan segala cara, politik tidak rohani, politik itu kawan dapat mengubah lawan menjadi kawan karena sama kepentingan politiknya, sebaliknya bisa kawan menjadi musuh jika berbeda kepentingan politiknya. Dalam konteks pandangan politik menurut kitab Injil dan kitab Roma dimana Paulus menempatkan posisi gereja terhubung dengan pemerintah atau negara. Pandangan ini juga dapat ditelusuri dengan dengan membandingkan bagaimana pendapat Karen L. Bloomquist. dkk, dalam bukunya *Churches Holding Governments Accountable* tentang relasi gereja dan pemerintah. Karen L.B. menyatakan ada tiga cara hubungan antara gereja dan pemerintah yang membawa kepada langkah yang salah.[1] Pertama, Gereja dan pemerintah adalah dua hal yang terpisah yang seharusnya tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Tipe ini menggambarkan suatu pemisahan yang pasti antara keduanya: gereja berhubungan dengan sesuatu yang hal-hal bersifat “rohani” dan pemerintah dengan hal-hal yang bersifat material. Ini barangkali disampaikan oleh seorang pietis yang melihat dunia sebagai yang jahat dan untuk dihindari sebisa mungkin. Atau barangkali dikembangkan oleh gagasan bahwa iman adalah semata-mata hubungan khusus “antara Allah dan saya” dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Tipe ini umumnya digambarkan dengan frase, “Agama dan politik tidak bercampur”. Kedua, Pemerintah mengendalikan gereja. Melalui paksaan, praktek tradisional atau kerelaan bekerjasama, gereja menjadi tunduk kepada pemerintah atau barangkali bahkan bawahan dari pemerintah. Tahta dan altar kelihatanya satu; Presiden dan Pimpinan Tertinggi Gereja berjalan bergandengan tangan, dan hadir untuk menghormati satu sama lain dalam kegiatan-kegiatan khusus. Dalam tipe ini, gereja memberikan dukungan tanpa syarat kepada pemerintah, apa yang pemerintah lakukan, gereja gemakan dan berkati. Gereja mungkin memperoleh kuasa dan perlakuan khusus tetapi kehilangan jarak kritis dari pemerintah. Gereja menjadi corong (*mouthpiece*) atau binatang piaraan (*lapdog*) pemerintah dan kebijakannya. Ketiga, Gereja mengendalikan pemerintah. Agama menggunakan kekuasaannya untuk memperlakukan pemerintah sebagai bawahannya bagi dirinya dan kepentingannya. Dalam tipe ini, “otoritas rohani (*spiritual authority*)” pemerintah yang superior memberinya hak untuk memimpin dan memerintah “otoritas sementara (*temporal authority*)” yang lebih kecil. Saat ini tipe ini barangkali kurang umum di antara gereja dibandingkan di antara beberapa kelompok agama yang lain dimana usaha-usaha diciptakan untuk menempatkan seluruh

masyarakat di bawah hukum agama tertentu sebagaimana ditafsirkan oleh pemimpin-pemimpin agama.[2]

### **Rumusan Tujuan Dan Hasil Penelitian**

Karls Deutch politik itu menjelaskan tentang suatu pembuatan keputusan yang dilakukan masyarakat; *“politics is the making of decision by public means”*. Rumusannya Deuth nyaris serupa dengan yang dilakukan oleh Joice dan William Mitchell yang mengatakan bahwa politik adalah pengambilan kolektif atau pembuatan kebijakan-kebijakan publik oleh seluruh masyarakat.[3] Gereja membutuhkan suatu rumusan yang tepat dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini gereja mencoba merumuskan bagaimana berdasarkan pandangan kitab Injil dan kitab Roma dan implikasi bagi gereja peran gereja dalam pusaran politik di negara Indonesia. Peranan gereja dalam menyikapi masalah yang terjadi sangat dibutuhkan untuk menghadirkan tanda-tanda syalom Allah bagi dunia ini melalui politik. Dunia politik selama ini dianggap sebagai hal yang tabu sehingga haruslah dijauhi, namun Paulus dalam Kitab Roma 13:1-7 menegaskan bahwa tugas umat Kristen di dunia ini adalah melayani dunia, bukan menjauhinya ketika mengalami kesulitan hidup. Untuk melayani dunia ini gereja perlu memberikan penguatan terhadap umat, termasuk memberikan pendidikan politik, agar umat dapat mengetahui perannya dalam dunia ini. Karena itu, tulisan ini hendak mengupas tentang pandangan politik Alkitab dalam menjalankan hak dan kewajiban warga negara sesuai UUD 1945. Gereja sebagai tempat dan instrumen yang mengajarkan hal-hal baik, membentuk karakter, etika, hingga menuntun umat dalam kebenaran menuju kepada kehidupan kekal.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Politik**

Politik dari bahasa Yunani *“politikos”*, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.[4] Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. [5]

### **Politik Menurut Kitab Roma**

Klaim teologis Paulus bahwa pemerintah itu “berasal, ditetapkan dan hamba” Allah sesungguhnya mengandung konsepsi politik yang luar biasa. Justru disitulah totalitas dan inti makna politik Teokrasi tetap merupakan garis konsisten para rasul. Teokrasi yang dimaksud adalah Pemerintahan yang dipimpin oleh Allah. Teologi Paulus Tentang Ketaatan terhadap pemerintah (Rm 13:1-7) sering menjadi acuan banyak kalangan saat adanya ketegangan antara Gereja dan Negara bahkan dapat dijadikan doktrin yang menuntut kepatuhan, tanpa daya kritis. Saat surat Paulus ini ditulis, Ketaatan umat terhadap pemerintah itu dimaksudkan untuk adanya ketaatan terhadap Pemerintah Roma yang dipimpin Oleh Kaisar Nero. Tahun 64 sampai 74 Masehi kaisar Nero sebagai kaisar yang sangat kejam dan anti kepada orang Kristen. Karena itu, Nero menfitnah bahwa orang-orang Kristen membakar kota Roma. Dengan kelicikannya Nero menghasut orang-orang Roma untuk memberantas orang Kristen. Akibatnya, orang-orang Kristen dihukum mati secara kejam luar biasa. Ada yang diadu dengan Singa, ada yang dijadikan obor hidup untuk penerangan pertandingan Gladiator di malam hari, dan masih banyak lagi. Bahkan banyak pemberita injil disiksa dan dibunuh. Pada masa Paulus, Orang Kristen di Roma berada dalam masa penghambaan, yang dilakukan oleh kekaisaran Romawi. Terhadap penindasan itu membuat umat sangat mengharapkan adanya kedatangan Yesus Kedua. Bagi jemaat saat itu, dunia yang temporal ini tidak perlu lagi dipedulikan oleh Orang Kristen dan yang dipentingkan adalah menantikan Kedatangan Yesus. Di sini Paulus hendak mengembalikan warga jemaat untuk mewujudkan suatu etika Kristen, termasuk etika politik. Penegasan Paulus disini, orang Kristen menantikan kedatangan Yesus bukan berarti dunia ini diabaikan, disangkal dan ditentang, tetapi justru harus dilayani. Keyakinan Paulus bahwa pemerintah itu hakekatnya berasal dari Allah, untuk itu ia harus didengar dan ditaati. Pernyataan ini tentunya sangat sulit untuk diterima oleh umat Kristen yang saat itu sedang mengalami perhambaan oleh kekaisaran Romawi. Namun maksud Paulus di sini

ingin menegaskan agar umat tidak mengabaikan dunia ini dengan kondisi tersulit yang dialami, tetapi tetaplah berusaha untuk menciptakan tatanan dunia yang adil dan damai, termasuk menciptakan suasana politik yang bersih dan egaliter. Teologi Paulus tentang Ketaatan Terhadap Pemerintah, tidak terlepas dari konteks masyarakat Roma saat itu. Paulus memberitakan tentang ketaatan dalam konteks imperium romawi yang kafir (Pemerintah dan aparatnya) sebagai hamba Allah. Rasul Paulus dalam Roma 13 : 1-7 menjelaskan bagaimana hidup sebagai warga negara. Gereja yang ada di Roma diperintahkan rasul Paulus mematuhi pemerintahan Romawi. Kepatuhan kepada pemerintah yang berkuasa merupakan suatu keharusan bagi orang Kristen, sebab orang Kristen bergantung dan terikat kepada pemerintah secara hukum. Setiap warga negara yang melakukan pembangkangan atau pelanggaran terhadap peraturan atau hukum akan dikenakan sanksi atau hukuman oleh pemerintah yang berkuasa.[6]

Konteks kepatuhan warga negara Indonesia merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa memandang SARA, sebab memiliki status sederajat di mata hukum yang berlaku. Pandangan politik Paulus dalam kitab Roma menjelaskan bahwa pemerintah memiliki otoritas hukum yang sah. Paulus mengingatkan Gereja (orang Kristen) bahwa pemerintahan berasal dari Allah. Paulus dalam tulisannya menyatakan "... sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah" (Rm 13:1). Sesuai zamannya pemerintah yang berkuasa dalam Roma 13 : 1 berlaku universal, bukan saja khusus hanya untuk pemerintah Roma. Kata kerja Yunani "*hupotasso*" (30 kali muncul dalam PB). Hal ini menjelaskan bahwa bukan hanya dalam kitab Roma saja disinggung tentang pemerintahan. Maksudnya terlepas bahwa pemerintahan itu berazaskan ayatu berdasarkan hukum apa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Secara harafiah kata "*hupotasso*" artinya "menempatkan diri di bawah". Hal ini menunjuk kepada sikap kepatuhan yang harus dimiliki oleh gereja atau orang-orang Kristen. Kepatuhan dijabarkan dalam hubungan juga kepada Allah (bnd Yak. 4:7), hukum Allah (Rm 8:7) dan terhadap Yesus Kristus (Ef.5:24), serta kepada para pelayan di rumah Tuhan (1 Kor.16:16). Namun jika diteliti kata "*hupotasso*" yang terdapat dalam Roma 13 : 1 bahwa kepatuhan kepada pemerintah tidak bersifat mutlak. Maksudnya ada syarat tertentu yaitu jika pemerintahan tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Pemahaman ini menjadi suatu sikap yang dilakukan oleh para rasul khususnya rasul Petrus yang menyatakan di hadapan mahkamah Agama Yahudi dengan ungkapan "...kita harus lebih taat kepada Allah dari pada terhadap manusia" (Kis. 4 : 19, 5:29). Kata lain yang dimaksud ialah kata "takluk" yang menunjuk

kepada sikap kerendahan hati dari warga negara kepada pemerintah atau yang berkuasa. Warga negara atau rakyat mematuhi atau melakukan peraturan UU yang berlaku.[7] Tentang masalah ini, A. Munthe menyatakan, Paulus mengingatkan gereja agar hubungan gereja dengan pemerintah berjalan baik, “Pemerintah menjalankan kuasanya selaku hamba Allah dan negara. Orientasi pemerintahan ialah melayani rakyat demi Allah. Warga negara harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan kepatuhan. Di sini acuan tertinggi adalah hukum Allah. Peran gereja sebagai warga negara terhadap pemerintahan adalah mengawal atau mengontrol bahkan jika dibutuhkan memberikan nasihat (teguran) jika pemerintahan menyimpang dari hukum yang sudah ditentukan atau yang berlaku di negara tersebut. Gereja tidak boleh berdiam diri terhadap pemerintahan yang sewenang-wenang atau menyimpang dari hukum atau peraturan yang sah. Secara konkret dan khusus rasul Paulus memberikan nasihat yang berhubungan hak dan kewajiban warga negara untuk membayar pajak (Rm 13:6,7). Pada masa itu kewajiban ini merupakan hal begitu kuat menjelaskan tentang kepatuhan atau pengakuan orang atau sekelompok orang terhadap pemerintah atau penguasa. Masalah membayar pajak bukti nyata keterlibatan rakyat mendukung pemerintahan yang sedang berkuasa. Paulus menyadari bahwa bukan berarti orang-orang Kristen baik yang di Roma maupun belahan bumi lainnya tidak mengalami kesulitan dalam hal membayar pajak. Kepatuhan orang-orang Kristen saat itu menjelaskan pengakuan bahwa pemerintahan tersebut berasal dari Allah. [8]

### **Politik Menurut Kitab Injil**

Jadi, politik pada hakikatnya menawarkan berbagai pilihan kebijakan untuk mengurus negara dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Bahwa terdapat banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya, tidak bisa kita pungkiri, tapi yang jelas politik bertujuan agar pemerintahan suatu negara terselenggara dengan baik. Dengan definisi tersebut, maka warga gereja seharusnya tidak perlu merasa “tabu” berbicara tentang politik, atau mengatakan bahwa politik itu bukan urusan gereja dengan alasan dapat mencemarkan kekudusan gereja. Ketika tinggal di bumi, Yesus sendiri tidak menghindar dari kegiatan politik. Ia pernah ditanya oleh orang-orang Farisi dan Herodian tentang pajak, “Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?” (Mat 22:17). “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Mat 22:21).

Bukankah membayar pajak kepada negara merupakan bagian dari aktivitas politik? Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada kesenjangan antara gereja atau orang Kristen dengan negara dewasa ini. Kesenjangan yang terjadi antara gereja atau orang Kristen dengan negara dapat dilihat dari adanya sebagian warga Gereja Kristen yang anti pemerintah. Mereka berpandangan politik dianggap kotor, dan pemerintah dianggap mendiskreditkan gereja/orang Kristen. Gereja yang *apolitis* memang tidak dapat dipastikan berapa persen dan sejauh mana mereka bersikap *apolitis*. Sikap *apolitis* Gereja tidak salah dalam pengertian mewaspadaai terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Sikap *apolitis* yang berlebihan mengakibatkan persepsi negatif. Dengan adanya persepsi negatif yang berlebihan dapat menimbulkan apatis sehingga merasa tidak bertanggung jawab.[9]

Kelompok ini mencari data khususnya dari penulis Injil menceritakan beberapa peristiwa selama pelayanan Yesus yang bisa membuatnya terlibat dalam politik. Misalnya, tak lama setelah Yesus dibaptis kira-kira pada usia 30, Iblis menawarkan kepadanya kedudukan sebagai *penguasa dunia*. Belakangan, orang-orang ingin menjadikan dia *raja* mereka. Kemudian, ada yang berupaya menjadikan dia *aktivis politik*. Apa tanggapan Yesus? Mari kita simak peristiwanya. Injil menyatakan bahwa Si Iblis menawarkan kepada Yesus kekuasaan atas "semua kerajaan dunia". Bayangkan hal-hal baik yang bisa Yesus lakukan bagi umat manusia yang menderita seandainya ia menjadi penguasa dunia! Seorang tokoh politik yang peduli kepada rakyat pasti tidak bakal menolak tawaran seperti itu. Tetapi, meskipun Yesus sangat peduli kepada manusia, ia menolak tawaran tersebut. (*Mat. 4:8-11*). Banyak orang pada zaman Yesus mendambakan penguasa yang dapat membereskan problem ekonomi dan politik yang mereka hadapi. Karena terkesan dengan kesanggupan Yesus, orang-orang ingin agar ia terjun ke dalam kancah politik. Apa tanggapan Yesus? Penulis Injil Yohanes mengatakan, "Ketika Yesus tahu bahwa mereka akan segera datang dan hendak membawanya dengan paksa untuk menjadikannya raja, ia sekali lagi mengundurkan diri ke gunung sendirian." (*Yoh. 6:10-15*) Jelaslah, Yesus tidak mau terlibat dalam politik. Perhatikan apa yang terjadi beberapa hari sebelum Yesus dihukum mati. Yesus didekati oleh beberapa murid orang Farisi, yang ingin merdeka dari Imperium Romawi, juga oleh para pengikut Herodes, anggota partai politik yang mendukung Roma. Mereka ingin memaksanya untuk mendukung pihak tertentu. Mereka bertanya apakah orang Yahudi harus membayar pajak kepada Roma atau tidak. Markus mencatat jawaban Yesus, "Mengapa kamu menguji aku? Bawalah kepadaku sebuah dinar untuk dilihat." Mereka membawa satu. Dan ia mengatakan kepada mereka,

'Gambar dan tulisan siapakah ini?' Mereka mengatakan kepadanya, 'Kaisar.' Yesus kemudian mengatakan, 'Bayarlah kembali perkara-perkara Kaisar kepada Kaisar, tetapi perkara-perkara Allah kepada Allah.'" (*Mrk. 12:13-17*) Buku *Church and State - The Story of Two Kingdoms* mengomentari alasan di balik jawaban Yesus, "Ia tidak mau bertindak sebagai mesias politik dan dengan bijaksana ia menetapkan batasan antara hak Kaisar dan hak Allah." Kristus bukannya tidak peduli akan kemiskinan, korupsi, dan ketidakadilan. Malah, Alkitab memperlihatkan bahwa Yesus sangat prihatin dengan keadaan yang mengesankan di sekitarnya (*Mrk 6:33, 34*). Berdasarkan penjelasan di atas, dengan jelas dan tegas Yesus tidak memulai kampanye untuk menyingkirkan ketidakadilan dunia, meskipun ada yang berupaya menyeret Yesus agar terlibat dalam isu-isu kontroversial di zamannya. Dengan singkat, sebagaimana diperlihatkan contoh di atas, dapat dipahami bahwa Yesus tidak tertarik dan tidak merencanakan untuk terlibat dalam urusan politik. [10]

### **Sikap Gereja Terhadap Politik Menurut Alkitab**

Orang Kristen sebagai orang yang percaya yang terpanggil dan telah menerima tugas dari Yesus Kristus harus menunjukkan ketaatan kepada Tuhan di segala bidang kehidupan. Orang Kristen harus mempunyai kebiasaan untuk melihat seluruh masyarakat yang berpolitik dan peraturan-peraturan politik dibawah penghukuman dan anugerah Allah. Itu dapat diartikan bahwa orang Kristen berpartisipasi dibidang politik ialah karena segi politik itu tetap di bawah kuasa dan anugerah Allah (bnd. Rm.13:4). Orang kristen atau Pendeta sebagai warga negara harus aktif dalam politik dengan cara tetap hidup sebagai garam dan terang. Orang Kristen tidak hanya sebagai warga negara yang baik tetapi dia harus mampu menggambarkan atau memperlihatkan kehendak Allah di dalam kehidupannya yaitu di dalam kehidupan berpolitik. Orang Kristen bertanggung jawab untuk memelihara dan menumbuhkan kesatuan dan persatuan antara umat yang berbeda agama (bnd. Mat. 5:13-16; I Ptr. 2:12). Gereja dalam eksistensinya di dunia ini, terkadang kehilangan daya kritisnya dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi. Baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Mungkin saja sejarah masa lalu masih berlaku dalam kehidupan bergereja saat ini di mana adanya bantuan-bantuan yang selalu diberikan oleh pemerintah terhadap gereja, mulai dari pembiayaan pembangunan gedung gereja, pembangunan pastori hingga memfasilitasi setiap persidangan-persidangan gerejawi pada aras tertinggi di tingkat sinodal sampai ke tingkat jemaat. Memang perlu disadari bahwa bantuan-bantuan yang diberikan

oleh pemerintah adalah sesuatu yang lumrah/wajar, karena pemerintah adalah mitra gereja tetapi janganlah bantuan-bantuan itu dapat menghilangkan daya kritis gereja dan menghalangi suara kenabian. Bantuan pemerintah tersebut bisa mempersubur budaya *malu hati* dalam gereja sehingga gereja yang memiliki kekuatan moral tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja ada di dunia, itu berarti harus menerangi dunia termasuk politik. Hak politik haruslah digunakan dengan baik untuk kesejahteraan umat. Berpolitik di sini adalah memperjuangkan hak umat. Bukan masuk dalam partai politik dan memperebutkan kekuasaan. Gereja sebagai penyalur suara kenabian harus terus menunjukkan eksistensinya. [11]

### **Dampak Politik Bagi Gereja**

Ciri yang paling khas dari politik didasarkan pada perspektif Alkitab, atau Kerajaan Allah itu, adalah hadirnya suatu tatanan kehidupan yang memungkinkan seluruh insan ciptaan Tuhan dapat hidup dalam kesejahteraan, keadilan, kejujuran dan kebenaran. Menggali pemahaman iman Kristen menyangkut politik dan dapat menjadi pendorong keberanian untuk menerjemahkannya secara pas ke dalam realitas konkret. Artinya, terurai pemahaman yang jelas dan pasti menyangkut sikap iman untuk menjadikan politik sebagai keharusan pelayanan. Meningkatkan prakarsa dan partisipasi politik dalam pengembangan karakter bangsa dan Negara yang beradab dan imaniah. Meningkatkan dan mengembangkan pola kehidupan beriman pada arena politik masyarakat Indonesia yang bercirikan pluralitas. Mendorong prakarsa bagi kehidupan masyarakat yang solider, kerja sama seluruh komponen pada segala jenjang dan aras. Gereja dalam eksistensinya di dunia ini, terkadang kehilangan daya kritisnya dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi. Baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Mungkin saja sejarah masa lalu masih berlaku dalam kehidupan bergereja saat ini di mana adanya bantuan-bantuan yang selalu diberikan oleh pemerintah terhadap gereja, mulai dari pembiayaan pembangunan gedung gereja, pembangunan pastori hingga memfasilitasi setiap persidangan-persidangan gerejawi pada aras tertinggi di tingkat sinodal sampai ke tingkat jemaat. Gereja ada di dunia, itu berarti harus menerangi dunia termasuk politik. Hak politik haruslah digunakan dengan baik untuk kesejahteraan umat. Berpolitik di sini adalah memperjuangkan hak umat. [12]

Menarik untuk disimak penulis mengutip tulisan Dr. Jim Haris dalam artikel *The Church's Role in Politics (1999)* yang mengatakan gereja punya peran penting dalam politik. Ia mengajukan dua alasan yakni : *pertama*, banyak warga gereja yang setiap hari harus menghadapi masalah

sosial-politik-ekonomi. Kebijakan politik yang dibuat pemerintah berhubungan langsung dengan kualitas kehidupan warga gereja. Gereja tidak bisa lepas dari realitas yang dihadapi jemaatnya. Bahkan Alkitab telah menunjukkan banyak tokoh yang aktif terlibat dalam politik seperti Amos dan Daniel. Johannes Pembaptis dan Yesus Kristus juga banyak berbicara tentang kondisi politik pada masa mereka. Keterlibatan gereja dalam politik merupakan bentuk reflektif iman terhadap lingkungan sekitarnya. *Kedua*, gereja harus membawa suara kenabian. Kenabian yang dimaksud adalah membawa suara Allah kedalam proses pembuatan kebijakan, stuktur dan isu-isu yang mengarah pada kemanusiaan secara umum. Gereja harus berani mengatakan “setuju” dan “tidak setuju” terhadap kebijakan dan janji pemerintah. Keputusan gereja menyatakan ”setuju” berarti mendukung program pemerintah yang komit kepada penyediaan pendidikan yang bermutu, memberikan akses kesehatan yang baik dan significant dan hal-hal lain yang membuat kehidupan warga menjadi lebih baik. “Tidak” ditujukan kepada tindakan penyelenggara pemerintahan yang koruptif, manipulatif, sengaja melakukan kesalahan dan tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat. [13] Lantas bagaimana gereja secara institusi melaksanakan peran politiknya itu? Tulisan Dr. James Emery White dalam artikel *Christian and Politics (2012)* menarik dijadikan sebagai rujukan. Menurut White gereja bisa mengambil posisi resmi, asalkan tidak langsung mendukung atau menentang calon dalam proses pemilihan. Gereja dapat membantu warga untuk memahami pilihan apa yang baik bagi mereka, namun hal itu boleh dilakukan selama mereka (warga) diarahkan pada semua pemilih yang berhak dan tidak menuju hanya satu partai politik. [14]

### **Hak Politik Warga Negara Indonesia**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 disebutkan tentang hak politik sebagai warga negara Indonesia, sebagai berikut : 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal Undang-Undang Dasar 45 di atas menerangkan tentang hak dan kewajiban warga negara, bahwa setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama tanpa pembedaan suku, bahasa, dan agama. Dalam hal ini tampak bahwa orang Kristen tidak dikecualikan, namun orang Kristen punya hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara lainnya. Dr. A.A. Yawengoe

mengatakan: karena gereja bagian dari Negara, punya hak dan kewajiban yang sama. Gereja mesti taat dan setia kepada pemerintah yang berkuasa. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 memberi suatu pengertian bahwa setiap warga negara tanpa kecuali punya tanggung jawab yang sama sebagai warga negara dan punya hak yang sama untuk berpartisipasi menjunjung tinggi program dan kegiatan pemerintah. Sebagai Gereja bahwa pemerintah suatu negara dipakai Allah sebagai wakil Allah di dunia untuk menata kehidupan warga negara. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dan diterangkan oleh penulis surat Roma 13:1-7. Karena itu dikatakan bahwa kepedulian terhadap kehidupan bersama negarawi merupakan tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan oleh orang gereja. Gereja sebagai warga negara mestilah berpartisipasi politik merupakan kewajiban yang legal formal sesuai UUD 45.[15]

Eddy Paimoen mengatakan bahwa orang Kristen tidak hanya berjuang untuk mendapatkan “*political power*” atau “*governmental power*” tetapi perjuangan untuk melaksanakan “*intellectual revolution*” untuk mendapat “*intellectual power*” dalam semua disiplin ilmu agar mampu berperan serta dalam membangun masyarakat baru, sebagai wujud kerajaan Allah di bumi yang berazaskan kebenaran, keadilan, kekudusan dan pengampunan. Dengan memiliki “*intellectual power*” umat Kristen akan dapat menjadi garam yang akan menggarangi bangsa ini dan akan menjadi terang yang akan menerangi bangsa ini, menjadi bangsa yang solid yang berdiri di atas dasar Pancasila dan UUD 1945.[18] Kehadiran gereja-gereja di Indonesia haruslah masuk dalam sejarah kehidupan umat manusia dan memberikan dinamika dan perspektif baru. Kehadiran gereja di Indonesia ini adalah alat bagi pengenalan karya penyelamatan Allah yang berdampak bagi kemajuan masyarakat dalam peningkatan taraf hidup dan penegakan keadilan sosial serta perikemanusiaan. Menurut Einar Sitompul, yang mesti dilakukan adalah: *Pertama*, mengevaluasi secara kritis kehadiran gereja selama ini. Apakah sudah turut bersama-sama dengan semua komponen masyarakat yang berjuang untuk kehidupan yang lebih adil? *Kedua*, turut mengupayakan terciptanya tatanan yang lebih demokratis, adil dan manusiawi mulai dari lingkungan kita sendiri. Sehubungan dengan itu, isu HAM yang menjadi agenda dunia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penghayatan iman Kristen, karena manusia adalah ciptaan Allah yang bermartabat. Setiap penindasan harus ditentang karena penindasan itu bertentangan dengan kehendak Allah yang menghendaki kehidupan ini berniat memberikannya di dalam kelimpahan.[16]

Bagaimana sesungguhnya sikap warga gereja terhadap politik? J. Philip menyatakan bahwa gereja harus didorong untuk aktif mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun peran aktif politik gereja juga punya batasan. Prof. J. Philip Wogaman membantu kita membatasi atau menguraikan peran politik gereja kedalam tujuh level partisipasi politik. Penggunaan level partisipasi itu sangat dinamis, tergantung kondisi riil di tengah masyarakat. Dalam kondisi normal gereja secara institusi hanya boleh menggunakan tiga peran politiknya yaitu: (1) *influence the ethos*, (2) *educating the church's own membership about particular issues*, dan (3) *church lobbying*. Jika merujuk pada Prof. J. Philip Wogaman, maka gereja bahkan tidak bisa melakukan politik praktis seperti contohnya mempromosikan salah satu kandidat. Gereja bisa mendoakan dan menekankan tanggung jawab moral. Gereja harus tegas, namun mesti konstruktif dan inovatif dalam mendidik warga dalam menggunakan hak politiknya. Tetapi dalam keadaan yang relative bebas seperti di negara demokratis, peran politik gereja cenderung lebih sedikit dan sederhana. Berdasarkan beragaman hubungan di atas, Wogaman merumuskan tingkatan partisipasi politik gereja menjadi tujuh bagian: Tingkatan pertama, *influence the ethos* (memengaruhi etika). Tugas pertama gereja adalah menegakkan etika atau moral dalam masyarakat dengan menyuarakan kebenaran dan mengoreksi yang salah. Tingkatan kedua adalah *educating the church's own membership about particular issues* (pendidikan politik warga gereja tentang isu-isu penting). Tingkatan ketiga adalah *church lobbying* (lobi gereja). Gereja dapat melakukan lobi-lobi terhadap para pengambil keputusan politik agar keputusan politik yang dibuat baik oleh legislatif maupun eksekutif tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Tingkatan keempat, *supporting particular candidate for office* (mendukung calon tertentu). Prinsip ini adalah prinsip pemihakan yang dilakukan oleh gereja dalam situasi tertentu, terutama ketika penguasa bertindak diktator atau diskriminatif dan tidak menegakkan keadilan dan hak-hak asasi manusia. Tingkatan kelima adalah *becoming a political party*. Di Indonesia sendiri, terutama sejak era reformasi, partai politik berbasis agama (termasuk Kristen) bermunculan. Lahirnya partai politik seperti ini disponsori oleh warga gereja yang terlibat dalam politik, dan bukan dibentuk langsung oleh salah satu denominasi gereja. Tingkatan keenam ialah, *civil disobedience* (pembangkangan sipil). Dalam situasi krisis, gereja dapat melakukan pembangkangan sipil, yaitu menentang dan melawan pemerintah yang berkuasa dan menolak segala undang-undang yang tidak adil itu (bnd. Kis. 5:29). Tingkatan ketujuh, *participating in revolution* (ikut dalam revolusi). Dalam kondisi khusus yang sangat luar biasa, gereja pun ikut berpartisipasi dalam revolusi untuk menggulingkan pemerintah

yang korup. [17] Pada tingkatan keenam dan tujuh menurut Wogaman ditanggapi hampir sama oleh O'Neil, bahwa teks Roma 13:1-7 tidak berasal dari orang Kristen maupun Yahudi. Alasannya karena tradisi Kristen dan Yahudi memerintahkan kepatuhan kepada penguasa duniawi tetapi tidak pernah dalam ketaatan yang mutlak.[18]

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Gereja adalah warga negara harus berperan sesuai hak dan kewajibannya yang didukung UUD, UU dan peraturan lainnya. Sedang Alkitab khususnya kitab Injil dan Kitab Roma menganjurkan bahwa gereja harus berperan sebagai kepatuhannya kepada Tuhan dan pemerintah. Dari kedua pandangan politik kitab Roma dan kitab Injil, maka implikasi bagi peran gereja dalam pusingan politik di Indonesia, yaitu keduanya menjelaskan peran aktif sebagai individual dan institusi. Sedangkan perbedaannya dengan jelas dan tegas bahwa dalam kitab Injil dinyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus dan rasul-rasul bukanlah suatu aktivis politik. Oleh karena Yesus dan para rasul dalam kitab Injil tidak terlibat dalam urusan politik, maka dasar inilah dipakai oleh dan untuk gereja khususnya pejabat gerejawi tidak terlibat menjadi politikus.

### **Saran**

Gereja harus ada dalam proses perumusan kebijakan publik. Gereja harus aktif mempengaruhi kebijakan negara melalui politik. Gereja tidak bisa menarik diri atau diam terhadap proses politik.. Gereja harus seperti nabi, berbicara atas nama Allah. Gereja harus memberitakan nilai-nilai etika yang memperkaya bangsa. Gereja harus berani dan tegas, konstruktif dan inovatif khususnya terhadap korupsi, ketidakadilan, kesewenang-wenangan penguasa. Gereja harus menjadi “garam dan terang” dalam lingkungan baik dalam masyarakat maupun di pemerintahan.

### **Kepustakaan**

[1] Karen L. Bloomquist, dkk, Churches Holding Governments Accountable, LWF, Geneva 2010: hlm. 21-24.

[2] Tom Jacobs, Paulus: Hidup, Karya dan Teologinya, hlm. 193-194. Akan hal ini, menurut Tom Jacobs, Bornkamm menyebut surat ini “surat wasiat”.

[3] C. Groennen, Pengantar ke dalam Perjanjian Baru, Kanisius, Yogyakarta, 1984: hlm. 218-220.

[4] <https://id.wikipedia.org/wiki/Politik> 29/09/2018.12:21

- [5] Sirait Saut Hamonagan, “ Politik Kristen di Indonesia”, (BPK-Gunung Mulia), Jakarta;2001; Hlm 137.
- [6] Tom Jacobs, Paulus: Hidup, Karya dan Teologinya, BPK Gunung Mulia & Kanisius, Jakarta & Yogyakarta, 1983: hlm. 93-94.
- [7] F.F.Bruce, Romans: Letter of Paul, Wm.B. Eerdmans Publishing Company, Michigan, 1985: hlm. 218.
- [8] Bruce, hlm. 219.
- [9] A. Munthe, A. Munthe, Tema-tema Perjanjian Baru, BPK Gunung Mulia, Jakarta 2008: hlm. 84., baca Dr. Th. Van den End, Surat Roma, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1995, hlm. 86-87.
- [10] A. Munthe, hlm. 691-708.
- [11] Samuel Benyamin Hakh, *Pemberitaan Tentang Yesus Menurut Injil Sinoptik*, Bandung : Jurnal Info Media, 2008, hlm. 23-166, 187-213; juga Marulak Pasaribu, *Eksposisi Injil Sinoptik*, Malang : Gandum Mas, 2005, hlm 135-178
- [12] Bruce Chilton, Studi Perjanjian Baru bagi Pemula, BPK Gunung Mulia, Jakarta 2004: hlm. 53-54.
- [13] James Emery, Christian and Politics, White newsletter CCA Connection, Cincinnati Christian University, AS, 2012.
- [14] Jim Haris, The Church’s Role in Politics, The Big Picture, 1999 dalam <http://thebigpicture.homestead.com/ChurchinPolitics.html> diakses *Minggu (01/09/2013) pukul 13.00 wib.*
- [15] James Emery, Christian and Politics, White newsletter CCA Connection, Cincinnati Christian University, AS, 2012. Baca juga C.C. Pecknold, *Christianity and Politics: A Brief Guide to the History* (Cascade, 2010)
- [16] Eddy Paimoen, Kerajaan Allah dan Gereja, Bandung : Agia Media, 1999: hlm. 65,66, 113,114.
- [17] J. Philip Wogaman, Christian Perspective on Politics, Westminster John Knox Press, 2000.
- [18] J.C.O’Neill, Paul’s Letter to the Romans, Harmondsworth, Middlesex, Penguin Books 1975: hlm. 207-208.